EDISI TIGA BULANAN

KUTIM HEBAT

HANDAL, ELABORATIF, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK & PERSANDIAN

EDISI 03
kutaitimurkab.go.id



DANA RT RP250 JUTA, MEMBANGUN KUTAI TIMUR DARI LINGKUNGAN TERKECIL

Terwujudnya Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing

DINAS KOMINFO STAPER
KABUPATEN KUTAI TIMUR

INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR

5 Pesan Presiden
tentang Transformasi Digital Pemerintah

“Digitalisasi pemerintah mutlak harus kita lakukan.”

Transformasi digital pemerintah menjadi fondasi birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

“Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi.”

Teknologi mendekatkan pelayanan sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

“Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara.”

Satu sistem yang terhubung memudahkan pelayanan bagi masyarakat, dari egosistem menuju ekosistem.



“Saya ingin Indonesia memiliki pemerintah digital berkelas dunia.”

Transformasi digital menjadi langkah menuju birokrasi yang modern, efektif, dan berdaya saing global.

“Rakyat tidak boleh memasukkan data yang sama berkali-kali.”

Integrasi data menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

kutaitimurkab.go.id | Kominfo Kutim | @kominfo.kutim | Kominfo Kutim | @KominfoKutim | @kominfo kutim

KATA REDAKSI



Memasuki edisi ketiga, majalah ini kembali hadir menyajikan berbagai cerita dan informasi seputar pembangunan di Kutai Timur.

Setiap edisi memiliki tema dan sudut pandang yang berbeda. Namun, semangatnya tetap sama, yakni menghadirkan informasi yang dekat dengan masyarakat sekaligus mendokumentasikan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang diwujudkan di tengah masyarakat.

Redaksi secara khusus mengangkat Program Dana RT sebesar Rp250 juta per RT setiap tahun yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pembangunan di tingkat RT memiliki karakter yang beragam. Ada lingkungan yang membutuhkan perbaikan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk penanganan stunting.

Karena itu, pembangunan dari tingkat RT menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan pemerataan. Masyarakat yang berada paling dekat dengan persoalan tentu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan prioritas lingkungannya.

Melalui edisi ini, redaksi mencoba merekam perjalanan Program Dana RT tersebut—bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi kegiatan, pembangunan dan pemberdayaan, serta bagaimana manfaatnya hadir di tengah masyarakat.

Kami juga melihat bahwa program dengan dukungan anggaran yang besar membutuhkan keterbukaan, partisipasi dan pengawasan bersama. Pelibatan masyarakat menjadi penting agar setiap program dapat berjalan secara tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Pada akhirnya, Dana RT bukan sekadar tentang angka Rp250 juta. Lebih dari itu, program ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan pembangunan kepada masyarakat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi lingkungan untuk menentukan kebutuhan prioritasnya.

Edisi ketiga ini kami hadirkan sebagai bagian dari upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur untuk mendokumentasikan, menginformasikan dan mendekatkan berbagai proses pembangunan kepada masyarakat.

Semoga sajian ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan, sekaligus menjadi ruang refleksi bagi kita bersama dalam melihat perjalanan pembangunan Kutai Timur.

EDISI TIGA BULANAN
KUTIM HEBAT
HANDAL, ELABORATIF, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN
EDISI 03
kutaitimurkab.go.id



Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Kominfo Staper
Ronny Bonar H. Suburian, SE., M.A.P

Pimpinan Umum :
Kepala Bidang IKP & Kehumasan
Aji Nazaruddin, SH., MH.

Pengarah :
M. Lalu Joni Aswadi, SE.

Pemimpin Redaksi :
Arie Firdaus
Wahyu Yuli Artanto

Anggota Redaksi :
Wak Hedir
Maulana
Irhan

Penyunting Bahasa :
Tim Narabahasa

Penata Letak & Desain :
Wiryadi Tamrin

Alamat Redaksi :
Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi.

Majalah ini merupakan media informasi resmi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur sebagai sarana diseminasi program dan capaian pembangunan daerah. Seluruh materi yang disajikan bersumber dari perangkat daerah dan instansi terkait, serta telah melalui proses pengumpulan data, verifikasi, dan validasi sesuai dengan standar penyusunan informasi publik.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

PERLINSOS ITU APA?
KOK SEMUA ORANG DISURUH TAU?

ADA 2 CARA
DAFTAR PERLINSOS

Pilih cara yang paling mudah untuk anda!

1 DATANG LANGSUNG

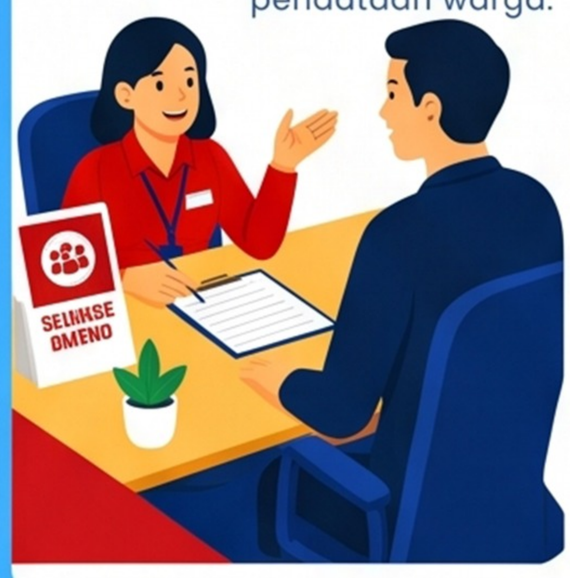
Datang ke lokasi layanan Perlinsos dengan membowa dokumen persyaratan.

DOKUMEN PERSYABATAN

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Nomer ID pelanggan PLN (tortera poda tagihan listrik

DIBANTU OLEH AGEN PERLINSOS

Agen Perlinsos di kelurahan dan kecamatan akan membantu proses penduftaran dan pendataan warga.



Datang ke lokasi layanan Fahineye tanakkat ta kebuatian, kecamatan, atau tempat layanan warya.

2 DAFTAR ONLINE

Mau daftar sendiri?
IKD wajíb sudah aktif



BELUM AKTIF IKD?

Aktif IKD bisa dilakukan di:

- Kantor Disdukeapil KABUPATEN KUTAI TIMUR
- Kantor Kecamatan
- Maii Pelayanan Publik (MPP)



Mari Bersama Mendukung Perlinsos Digital

Menuju bantuan sosial yang lebih akurat, transparanı, dan dan adil bagi selurü, masyarakat yan membutuhkan

DARI REDAKSI

BERITA UTAMA

6. Dana RT Rp250 Juta, Membangun Kutai Timur Dari Lingkungan Terkecil

LIPUTAN KHUSUS

8. Dana RT, Solusi Cepat Persoalan Lingkungan Warga Kutai Timur

ARAH KEBIJAKAN

10. Memperkuat Dana RT, Mengarahkan Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

KERJA KITA

12. Bupati Ardiansyah: Pelayanan Publik Kutim Harus Mudah dan Tanpa Pungutan

14. Perkebunan Sawit jadi Grand Desain Kekuatan Ekonomi Kutim

15. Pemkab Kutim Perkuat Koordinasi, Eliminasi HIV/PIMS Jadi Target Bersama Tahun 2030

16. Ruang Fiskal Terbuka, TPP ASN Kutim Berpeluang Naik 35 Persen Tahun 2027

17. Kutim Mantap Jadi Daerah Informatif, Pengutan PPID Desa Terus Digenjot

18. Dekranasda Kutim Dorong Pengembangan Sentra Tenun ATBM, Siapkan Tenun Jadi Identitas Daerah

20. Perkuat Tata Kelola, DWP Kutim Bekali Pengurus dengan AD/ART dan E-Reporting

21. Dari NTT ke Kutai Timur, Bergitta Temukan Harapana Baru Lewat Pelatihan Tenun ATBM

22. Pembangunan RS Muara Wahau Dimatangkan, Dinkes Kutim Targetkan Operasional 2029.

23. Wabup Kutim Mahyunadi Dorong Penerapan Manajemen Talenta ASN di Forum APKASI

BERITA PILIHAN

24. Komitmen Bangun SDM Digital Berbuah Manis, IMDI 2025 Lampaui Rata-Rata Nasional

26. Diskominfo Staper Kutim Siapkan "Terpadu Digital Kutai Timur", Satu Platform untuk Semua Layanan Publik

PESONA ETAM

28. Tangga Bidadari, Pesona Mata Air Alami di Kaliorang yang Menyimpan Jejak Laut Purba

30. Dari Sengat Jadi Berkah, Trigona Reborn Sulap Madu Kelulut Jadi Wisata Edukasi

SUARA ETAM

32. Dari Sengat Jadi Berkah, Trigona Reborn Sulap Madu Kelulut Jadi Wisata Edukasi



Dana RT Rp250 Juta, Membangun Kutai Timur Dari Lingkungan Terkecil

Upaya mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Melalui program Dana RT, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di lingkungan RT.

SANGATTA - Program Dana RT mulai hadir pada awal pemerintahan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada 2021. Pada awal pelaksanaannya, dukungan anggaran yang diberikan berada di angka sekitar Rp50 juta untuk setiap RT.

Gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dalam lingkup yang lebih kecil, sekaligus memastikan program pemerintah daerah dapat langsung menyasar masyarakat di tingkat paling bawah.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, program tersebut terus diperkuat. Pada periode pemerintahan berikutnya, Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi, dukungan anggaran Dana RT ditingkatkan menjadi Rp250 juta per RT setiap tahun.

Peningkatan nominal tersebut bukan sekadar penambahan anggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat konsep pembangunan yang dimulai dari lingkup terkecil. Pemerintah daerah ingin memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat RT dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah.

Konsep tersebut menjadi semakin penting bagi Kutai Timur yang memiliki wilayah geografis sangat luas, dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Terlebih, di sejumlah wilayah masih terdapat keterbatasan akses, terutama infrastruktur jalan yang menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan.

Melalui Dana RT, pemerintah memiliki instrumen untuk mendorong pembangunan dalam skala kecil namun bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak selalu harus menunggu program berskala besar dari pemerintah daerah, tetapi dapat bergerak berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ada di lingkungan masyarakat.

Cakupan pemanfaatan Dana RT pun cukup beragam. Tidak hanya untuk peningkatan infrastruktur skala kecil, program ini juga dapat diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, hingga mendukung berbagai program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Termasuk di dalamnya upaya penanganan stunting. Program yang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat tersebut ditangkap oleh pemerintah daerah untuk kemudian didukung melalui berbagai intervensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dukungan melalui Dana RT menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah daerah dalam memperkuat program nasional. Kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dapat diterjemahkan hingga ke tingkat masyarakat melalui intervensi yang lebih dekat dan sesuai dengan kondisi lokal.

Fleksibilitas pemanfaatan tersebut menjadi salah satu kekuatan program Dana RT. Setiap wilayah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pembangunan dapat diarahkan pada prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dari sinilah program Dana RT berkembang menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun dari atas ke bawah, tetapi juga memberikan ruang agar kebutuhan masyarakat dari bawah menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.

Dampaknya mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kehadiran anggaran langsung di tingkat RT memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawal pembangunan yang memang menjadi kebutuhan di lingkungannya.

Peningkatan dukungan anggaran dari Rp50 juta menjadi Rp250 juta per RT setiap tahun menunjukkan bahwa program tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan pembangunan. Besarnya anggaran sekaligus memberikan ruang yang semakin luas untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun penguatan kapasitas masyarakat.

Dengan wilayah Kutai Timur yang luas dan kondisi setiap daerah yang berbeda, pendekatan pembangunan berbasis RT menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pemerataan.

Karena itu, keberlanjutan program Dana RT menjadi harapan masyarakat. Bukan semata karena nilai anggarannya yang kini mencapai Rp250 juta per RT, tetapi karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada akhirnya, Dana RT bukan sekadar berbicara tentang besaran anggaran. Program ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, mempercepat pembangunan dari lingkup terkecil, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Kutai Timur.



Dana RT, Solusi Cepat Persoalan Lingkungan Warga Kutai Timur

Program dana bantuan RT yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat lingkungan. Anggaran yang dikelola melalui RT tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga menjawab berbagai kebutuhan warga yang sifatnya mendesak dan berskala kecil.

Di sejumlah lingkungan, dana RT dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur skala kecil yang bisa di lakukan dengan dana RT. Mulai dari jalan dan drainase, mengatasi genangan, menyediakan penerangan jalan, hingga melengkapi fasilitas sosial lainya. Persoalan infrastruktur yang terkadang tidak dapat segera ditangani melalui anggaran pembangunan yang lebih besar dapat diselesaikan melalui dana RT dengan mekanisme yang lebih dekat dengan kebutuhan warga yang berasal dari hasil musayawarah warga.

Program dana RT dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena mampu menjadi solusi untuk menangani berbagai persoalan lingkungan berskala kecil yang terkadang sulit dijangkau melalui anggaran pembangunan daerah.



Ketua RT 03 di Kelurahan Teluk Lingga Nirwan Rais mengatakan, sejumlah persoalan infrastruktur di lingkungannya dapat ditangani melalui dana RT, mulai dari kerusakan jembatan, bahu jalan yang berlubang, hingga perbaikan drainase.

“Dulu jembatan kami rusak, kemudian bahu jalan juga tiba-tiba bolong. Itu kami manfaatkan dana RT untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Salah satu manfaat yang paling dirasakan warga adalah perbaikan dan pembersihan parit. Menurutnya, sebelum dilakukan penanganan, hujan selama dua hingga tiga jam saja sudah menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang.Namun setelah parit dibersihkan dan diperbaiki menggunakan dana RT, kondisi tersebut berangsur membaik.

“Kalau ada parit rusak dua atau tiga meter, itu yang kami perbaiki. Ada jalan berlubang, kami perbaiki melalui dana RT. Yang tidak bisa dijangkau dengan APBD yang cukup besar, kami gunakan dana RT, misalnya Rp10 juta atau Rp20 juta,” jelasnya.

Menurutnya, dana RT menjadi instrumen penting untuk menangani pembangunan skala kecil yang tidak selalu dapat menunggu intervensi melalui APBD. Selain infrastruktur, dana RT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan lingkungan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang terhubung secara terpusat dan dapat dipantau selama 24 jam sehingga aktivitas lingkungan dapat lebih mudah diawasi.

Ia menegaskan, seluruh program tidak ditentukan secara sepihak. Setiap rencana pembangunan terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah tingkat RT dengan menampung berbagai usulan warga.

“Masukan warga kami tampung semuanya. Misalnya ada 20 permintaan, kemudian kami lihat mana yang menjadi skala prioritas. Yang paling penting kami kerjakan terlebih dahulu,” ujarnya.

Kebermanfaatan program dana RT di tingkat lingkungan membuat masyarakat berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan, baik dari sisi keberlanjutan program maupun nilai anggarannya.



Ketua RT 41 Robert Subandi menyampaikan, dana RT telah memberikan dampak langsung terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap mempertahankan program tersebut.

“Masukan dan saran saya, kalau bisa program dana RT ini dipertahankan, termasuk nilainya, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat kami,” ujarnya.

Ia menilai perubahan di lingkungan RT sudah mulai terlihat. Infrastruktur lingkungan semakin baik, penerangan jalan tersedia, keamanan didukung CCTV, sementara akses menuju sekolah juga terus dibenahi.

"Jalan kami sudah bagus, ada penerangannya, ada CCTV-nya, ekonomi juga mulai berkembang. Akses jalan ke sekolah-sekolah juga kami perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, ke depan pemanfaatan dana RT tidak harus berhenti pada pembangunan fisik. Program tersebut juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ia menyebut sejumlah potensi yang bisa dikembangkan, seperti content creator, ekonomi digital, hingga peningkatan literasi finansial bagi pemuda.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar manfaat dana RT tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih mandiri dan siap menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Bupati dan semua pihak. Semoga dana RT ini tetap dipertahankan karena betul-betul sangat bermanfaat untuk masyarakat kami," pungkasnya.



Ketua RT 11 Gunardi Teluk Lingga mengatakan, keberadaan dana RT telah membantu memperbaiki sejumlah fasilitas dasar yang sebelumnya menjadi persoalan bagi masyarakat.

Selain peningkatan kualitas jalan dan keamanan warga, dana RT, sambung Gun biasa ia di sapa, juga dimanfaatkan untuk mendukung kesiapsiagaan kesehatan lingkungan. Warga telah memiliki mesin fogging yang dapat digunakan ketika terjadi kasus demam berdarah dengue (DBD).

"Kalau ada warga yang mengalami masalah seperti DBD, kami sudah mempunyai mesin fogging sendiri. Alhamdulillah, kami bisa melakukan fogging secara mandiri," ujarnya.

Ke depan, warga juga berencana memanfaatkan dana RT untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Jika tidak terjadi perubahan pada anggaran dana RT, rencananya setiap rumah akan dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR).

Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup penting mengingat kondisi permukiman di wilayah RT 11 yang relatif padat dengan jarak antarrumah yang berdekatan.

"Wilayah kami ini sangat padat dan rumahnya juga cukup berdekatan. Dengan adanya APAR di masing-masing rumah, diharapkan bisa sedikit banyak membantu mencegah dan menangani kebakaran sejak dini," katanya.

Selain APAR, warga juga telah memiliki mesin pompa pemadam kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil sumber air dari sungai di belakang permukiman apabila terjadi keadaan darurat.

Penggunaan dana RT juga telah membantu penyediaan berbagai fasilitas sosial masyarakat, seperti kursi dan tenda yang dapat digunakan warga untuk berbagai kegiatan di lingkungan.

Ke depan, warga berharap program dana RT dapat terus dilanjutkan, termasuk untuk pengadaan penerangan jalan. Penerangan dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus keamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.

"Kami berharap ke depan bisa melakukan lagi pengadaan penerangan jalan, sehingga keamanan masyarakat ketika berjalan juga lebih baik," ujarnya.

Atas berbagai manfaat tersebut, ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak hanya mempertahankan program dana RT, tetapi juga mempertimbangkan peningkatan nilai bantuannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Saran kami kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, semoga dana RT ini terus berlanjut. Kalau bisa ditingkatkan, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat kami, khususnya masyarakat di wilayah Kelurahan Teluk Lingga," pungkasnya.

Pada akhirnya, keberadaan dana RT menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar. Persoalan yang terlihat sederhana di tingkat lingkungan justru kerap bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari jalan berlubang, drainase yang tersumbat, minimnya penerangan, hingga kebutuhan keamanan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

Dengan demikian, dana RT bukan semata-mata tentang besaran anggaran yang diterima setiap lingkungan, melainkan tentang bagaimana anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari persoalan kecil di tingkat RT, program ini secara perlahan dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, nyaman, mandiri, dan memiliki daya saing.



Memperkuat Dana RT, Mengarahkan Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

Program Dana RT Rp250 juta menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan perkotaan atau proyek berskala besar, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lingkungan RT.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut terus dievaluasi. Selama dua tahun terakhir masih ditemukan sejumlah kendala dalam penyerapan dan pelaksanaan Dana RT. Evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperkuat sistem dan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPDes) sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Kutim, Trisno, mengatakan evaluasi menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan. Karena itu, pembenahan tidak hanya diarahkan pada pelaksana di lapangan, tetapi juga pada regulasi yang menjadi pedoman pemerintah desa dan RT.



“Selama dua tahun berturut-turut terjadi hambatan dalam penyerapan bantuan khusus RT. Saya melihat ada kendala sistemik, bukan kendala personal,” ujar Trisno.

Atas dasar evaluasi tersebut, Pemkab Kutim menyiapkan perubahan Perbup dengan dua orientasi utama, yakni mempercepat proses penyaluran serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Dana RT. Regulasi yang diperbarui nantinya diharapkan memberikan pedoman yang lebih jelas, sederhana, mudah dilaksanakan, sekaligus tetap menjaga aspek akuntabilitas.

Perubahan ini menjadi penting karena regulasi sebelumnya dinilai belum cukup rinci dalam memberikan panduan mengenai skala prioritas. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa dan RT terkadang kesulitan menentukan kegiatan yang paling mendesak, terlebih kebutuhan masing-masing wilayah tidak selalu sama.

Melalui penyempurnaan Perbup, pemerintah ingin menggeser pendekatan Dana RT dari sekadar “membelanjakan anggaran” menjadi “menjawab persoalan”. Artinya, setiap penggunaan dana harus berangkat dari pemetaan kebutuhan dan urgensi masyarakat di masing-masing RT.

Empat Sasaran Utama Arah kebijakan Dana RT ke depan bertumpu pada empat sasaran utama.

Pertama, pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat RT. Dana RT dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat yang memang menjadi persoalan prioritas di wilayah tersebut. Namun, pembangunan infrastruktur tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Kedua, pengentasan kemiskinan. Dana RT diarahkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap persoalan kemiskinan sesuai kondisi masyarakat di tingkat paling bawah. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan warga yang membutuhkan perhatian lebih dapat menjadi bagian dari prioritas perencanaan.

Ketiga, percepatan penanganan stunting. Dana RT juga menjadi bagian dari upaya memperkuat intervensi terhadap persoalan stunting melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Keempat, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana RT diarahkan untuk membuka ruang bagi pengembangan potensi masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat dan memperkuat kemandirian masyarakat.

Trisno menegaskan, empat sasaran tersebut tidak harus diterapkan dengan pola yang sama di seluruh RT. Setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda sehingga prioritas penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Kita (Pemerintah) tidak hanya fokus kepada infrastruktur. Namun kepada empat item yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan RT dan desa masing-masing,” tegasnya.

Dengan demikian, RT yang memiliki persoalan utama pada infrastruktur tidak harus memaksakan untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, wilayah yang infrastrukturnya relatif memadai dapat memprioritaskan intervensi kemiskinan, stunting, atau penguatan ekonomi masyarakat. sehingga di harapkan pendekatan tersebut menempatkan ketepatan sasaran sebagai ukuran utama keberhasilan Dana RT.

Dari Regulasi Menuju Dampak

Penyempurnaan Perbup tidak berhenti pada perubahan mekanisme administrasi. Regulasi baru diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih jelas bagi pemerintah desa dan RT untuk menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, sekaligus menetapkan koridor agar penggunaan anggaran tetap terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Kutim juga membentuk tim kajian yang melibatkan unsur perangkat daerah terkait, mulai dari perencanaan, penganggaran, pemerintahan, hingga unsur pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. Berbagai masukan dari lapangan akan dianalisis sebelum dituangkan dalam rancangan perubahan regulasi.

Dengan mekanisme tersebut, tidak semua usulan akan langsung diakomodasi. Akan tetapi, setiap masukan akan dilihat berdasarkan dua prinsip utama yang menjadi arah kebijakan, yakni percepatan dan efektivitas penyelenggaraan.

Pada akhirnya, keberhasilan Dana RT tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak kegiatan yang terlaksana atau berapa banyak infrastruktur yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh dana tersebut mampu menjawab akar persoalan masyarakat di masing-masing RT.

Karena itu, RT didorong untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan. Pemetaan akar masalah dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah awal untuk memastikan setiap rupiah Dana RT memiliki tujuan yang jelas.

“RT harus mampu melakukan pemetaan akar masalah terhadap empat indikator target Dana RT dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan penggunaan Dana RT agar tepat sasaran,” kata Trisno.

Dengan arah kebijakan tersebut, perubahan Perbup diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat Dana RT sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Bukan sekadar Rp250 juta yang tersalurkan, tetapi menjadi sebuah jawaban yang benar-benar menghasilkan perubahan sesuai kebutuhan masyarakat.

Empat sasaran utama, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjadi pijakan agar Dana RT ke depan semakin terarah, adaptif terhadap kondisi wilayah, serta memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat Kutai Timur.



Bupati Ardiansyah: **Pelayanan Publik Kutim Harus Mudah dan Tanpa Pungutan**

Penulis : Maulana & Wahyu Yuli Artanto

SANGATTA – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik suap yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan hasil positif.

Komitmen tersebut berbuah penghargaan dari media nasional bertajuk Tribun Kaltim Award 2026 atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Ronny Bonar H. Siburian, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman. Penghargaan tersebut diraih atas pencapaian pemerintah daerah terkait Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap, yang ia terima mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu di Balikpapan.

Bupati Ardiansyah menyampaikan rasa bangga atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil dari upaya jajaran Pemkab Kutim yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak semestinya.

“Apa yang dilakukan teman-teman dalam pelayanan publik memang diarahkan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Prinsipnya, tidak ada hal-hal yang harus dibayar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik,” ujar Bupati Ardiansyah saat menerima penghargaan tersebut di ruang kerjanya, Kamis (13/08/2026).



Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si
Bupati Kab. Kutai Timur

> Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Semoga capaian ini semakin memotivasi seluruh elemen daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Ronny Bonar H. Siburian, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Kutim dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia mencontohkan layanan melalui Anjungan Dukcapil yang dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi secara lebih mudah dengan melengkapi data yang diperlukan.

"Berbagai layanan tersebut, merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kutim untuk memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan publik secara mudah, transparan, dan tanpa pungutan yang tidak semestinya," ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi digital menjadi salah satu strategi utama Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ditambah dengan kemudahan akses yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus diperkuat di berbagai sektor layanan publik di setiap Perangkat Daerah juga membantu mempercepat proses pelayanan sekaligus menciptakan sistem yang lebih transparan dan mudah dipantau.



"Dengan digitalisasi, proses pelayanan dapat dibuat lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,"

Ronny Bonar H. Siburian, SE., M.A.P
Kadis Kominfo Staper Kutim

Ronny menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi, tetapi menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Kutim untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," pungkasnya

Perkebunan Sawit jadi Grand Desain Kekuatan Ekonomi Kutim

Penulis : Maulana

SANGATTA - Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan grand design pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan sejak daerah itu berdiri tahun 1999 silam.

Kebijakan itu, lanjut Bupati Ardiansyah, menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga menjadikan Kutim sebagai salah satu sentra sawit terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia menjelaskan bahwa sejak Kutai Timur berdiri pada tahun 1999, pembangunan sudah diarahkan pada sektor agroindustri sebagai prioritas utama.
"Kemudian pada tahun 2001, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan perkebunan sebagai grand design pembangunan Kutai Timur," jelasnya di sela kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (05/08/2026).

Menurut Bupati Ardiansyah, kebijakan tersebut kini menunjukkan hasil yang nyata. Perkebunan kelapa sawit berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama daerah.

Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan sektor sawit menjadi bukti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan berpegang pada grand design yang telah disusun sejak awal, berbagai potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



"Ini membuktikan bahwa arah pembangunan yang dirancang sejak awal mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah sektor potensial yang perlu terus didorong agar mampu berkembang seiring keberhasilan sektor perkebunan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, lanjutnya, akan terus berupaya menjaga keseimbangan pembangunan sehingga seluruh potensi daerah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui komitmen tersebut, Bupati Ardiansyah berharap Kutai Timur tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Timur, tetapi juga mampu memperkuat sektor-sektor unggulan lainnya sebagai penopang ekonomi daerah di masa mendatang.

Pemkab Kutim Perkuat Koordinasi, Eliminasi HIV/PIMS Jadi Target Bersama Tahun 2030



Penulis : Irhan

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menyusun strategi dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) yang dinilai masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan sektor kesehatan daerah.Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi kepada masyarakat, perluasan layanan pemeriksaan, serta optimalisasi pencegahan dan penanganan bagi kelompok berisiko.

Terbaru, Dinas Kesehatan bersama Komisi Penanggulanagn AIDS Daerah (KPAD) menggelar rapat koordinasi bersama lintas sektor yang berlangsung Di Ruang Arau Sekretariat Daerah, kawasan Pemerintahan Sangatta, Kamis (06/08/2026).

Wakil Bupati yang juga menajabat Ketua KPAD Kutim, Mahyunadi memimpin jalanya Rakor yang turut di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Yuwana Sri Kurniawati, Perangkat Daerah terkait, termasuk Camat serta undangan lainya.Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya daerah dalam mendukung target nasional terkait pencapaian sebesar 95-95-95 (95% dari orang yang telah Didiagnosis Positif HIV. 95% dari orang yang telah didiagnosis positif HIV dan 95% dari orang yang menjalani terapi ARV) pada tahun 2030 mendatang.

Wabup Mahyunadi menegaskan dalam proses penanggulangan HIV diperlukan sinergitas dan kekompakan seluruh stekholder terkait. Selain itu, upaya pencegahan dan pengendalian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, hingga masyarakat secara luas.

Menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam memutus mata rantai penyebaran HIV. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan layanan kesehatan, deteksi dini, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

"Persoalan HIV bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan angka penyebaran dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat Kutai Timur semakin meningkat," ujarnya.

Selain itu, upaya pencegahan juga harus di lakukan secara menyeluruh dan di lakukan secara intensif yang menyasar dari hulu ke hilir. Mulai dari pendampingan dan pengobatan penderita secara tertutup. termasuk melakukan langkah preventif dengan mempersempit ruang yang berpotensi menjadi jalur penyebaran HIV melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaboratif.

"Melalui rapat ini, kita ingin menyelaraskan program dan daya dukungnya agar lebih maksimal, termasuk melakukan penjangkauan secara tertutup tanpa memunculkan stigma bagi penderita," kata Wabup Mahyunadi.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kutim dr. Yuwana Sri Kurniawati menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk terus menekan penyebaran HIV di Kutim. Sebagai tindak lanjut dari hasil Rakor. Pihaknya mengaku akan kembali melakukan pertemuan lanjutan guna memantapkan program kerja yang yang telah disusun.



Ruang Fiskal Terbuka, TPP ASN Kutim Berpeluang Naik 35 Persen Tahun 2027

Penulis : Daus

SANGATTA- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpeluang mendapatkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2027 mendatang. Rencana tersebut sejalan dengan kondisi belanja pegawai Kutim yang masih berada di bawah batas maksimal 30 persen dari pendapatan daerah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan tahun 2026, dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim), hanya dua daerah yang memiliki proporsi belanja pegawai di bawah 30 persen. Salah satunya adalah Kutim.

Dalam data tersebut, Kutim memiliki pagu pendapatan daerah sekitar Rp5.763,69 miliar, dengan belanja pegawai sebesar Rp1.599,15 miliar atau sekitar 27,75 persen dari pendapatan daerah. Persentase tersebut menjadi yang terendah kedua di Kaltim setelah Mahakam Ulu sebesar 23,21 persen.

Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan belanja pegawai pemerintah daerah ke depan, termasuk kemungkinan adanya peningkatan besaran TPP bagi ASN.

“Belanja pegawai kita masih di bawah 30 persen. Ini masih memungkinkan bagi kita (Kutim) untuk mengambil kebijakan itu (kenaikan TPP),” ujar Rizali, senin (10/8/2026) saat ditemui usai mengikuti rapat TPID via zoom di Kantor Diskominfo Staper Kutim. Menurutnya, ketentuan pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari APBD. Namun dirinya memastikan, sebelum mengambil kebijakan tersebut, dirinya memastikan,sebelum mengambil kebijakan tersebut, dirinya memastikan,pemerintah daerah akan melakukan penghitungan secara menyeluruh untuk memastikan kebutuhan belanja pegawai tetap terakomodasi tanpa mengganggu pembiayaan program pembangunan lainnya.

Rizali menegaskan, besaran APBD yang berubah tidak serta-merta dapat menjadi alasan untuk mengurangi belanja pegawai. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan melakukan perhitungan secara cermat terkait kebutuhan belanja pegawai, kemudian menyesuaikannya dengan alokasi untuk belanja modal, belanja barang dan jasa, serta program prioritas pemerintah.

“Kita standarkan dulu belanja pegawai kita, baru untuk masuk ke kegiatan lainnya, menyesuaikan dengan belanja modal, belanja barang jasa, sesuai dengan program pemerintah,”



Terkait kemungkinan kenaikan TPP ASN pada tahun depan, Rizali tidak menapik pernyataan tersebut yang saat ini masih dalam tahap pembahasan kebijakan tersebut. Adapun besaran nilai kenaikan TPP berkisar di angka 35 persen dibandingkan besaran yang diterima saat ini.

Namun, rencana tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil perhitungan APBD 2027. Pemkab Kutim akan memastikan peningkatan kesejahteraan ASN berjalan seimbang dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Kutim Mantap Jadi Daerah Informatif, Penguatan PPID Desa Terus Digenjot

Penulis : Irhan

SANGATTA- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. PPID sendiri memiliki peran sentral karena memiliki tanggung jawab untuk memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Diskominfo Staper Kutim melalui Kepala Bidang IKP dan Kehumasan, , Aji Nazaruddin mengatakan, dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peran PPID di tingkat kabupaten menjadi sangat strategis. PPID tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.



“PPID juga berperan dalam melakukan klasifikasi informasi, menentukan mana yang terbuka dan mana yang dikecualikan, serta memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan,”ujarnya

Seiring dengan semakin luasnya tuntutan keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa, dirinya menyebut, Pemerintah Kabupaten juga mendorong penguatan kapasitas PPID di level Pemerintahan desa. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pelatihan bagi PPID desa yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Diskominfo Staper Kutim yang melibatkan 75 operator desa dari 4 Kecamatan yang berlangsung di Royal Victoria Hotel Sangatta.

Kegiatan ini, menurut Aji, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan informasi publik, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan teknis dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

“Kita harapkan dengan adanya pelatihan ini, para oprataor desa mampu memahami apa saja yang harus di lakukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa, mulai dari pengelolaan data, pelayanan permohonan informasi, hingga penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.”pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur Hajaturamsyah yang hadir menjadi narasumber pada kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut mengungkapkan, bahwa Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah di Kaltim yang masuk dalam kategori Informatif. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi dan trobosan yang terus di lakukan oleh Diskominfo Staper selaku PPID Utama di tingkat Kabupaten.

"Dengan adanya penguatan kelembagaan PPID hingga ke tingkat desa. Ini menjadi langkah maju yang patut kita apresiasi,”ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses informasi bagi masyarakat. Sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Sebagai bagian penting dalam menjaga dan memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat di tengah masyarakat. kehadiran website desa yang menjadi etalase utama dalam menyampaikan berbagai informasi, potensi, dan keunggulan yang dimiliki oleh desa kepada masyarakat luas juga harus terus di kembangkan terutama dalam penyajian dan isi (konten). Hal itu bertujuan agar publik bisa mengetahui secara baik terkait potensi maupun informasi yang ada di wilayah tersebut.

Dekranasda Kutim Dorong Pengembangan Sentra Tenun ATBM, Siapkan Tenun Jadi Identitas Daerah

Penulis : Wahyu Yuli Artanto

SANGATTA – Ketua Dekranasda Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Siti Robiah, menegaskan komitmennya untuk mengembangkan kerajinan tenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Komitmen tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) angkatan ketiga yang diikuti para pengrajin dari sejumlah wilayah di Kutim, Rabu (05/08/2026)

Menurut Siti Robiah, keterampilan menenun tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat. Dibandingkan membatik, proses menenun membutuhkan peralatan yang lebih banyak, detail, dan rumit sehingga diperlukan pelatihan secara berkelanjutan agar para pengrajin semakin terampil.

“Tenun tidak bisa dipelajari hanya satu atau dua kali pelatihan. Diperlukan latihan yang berkesinambungan agar kualitas produk terus meningkat,” ujar istri orang nomor satu di Kutim ini.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang terus mendukung pengembangan industri kerajinan lokal. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas pengrajin sekaligus memperkuat daya saing produk tenun khas di tanah Tuah Bumi Untung Banua ini.

Siti Robiah mengajak para pengrajin untuk terus berinovasi menciptakan motif dan desain yang mencerminkan kekhasan masing-masing daerah. Namun, ia mengingatkan agar identitas sebagai produk khas Kutai Timur tetap dipertahankan sehingga memiliki ciri yang mudah dikenali masyarakat.

“Silakan mengembangkan motif sesuai karakter daerah masing-masing, tetapi identitas Kutai Timur harus tetap melekat pada setiap karya yang dihasilkan yakni motif Wakaroros,” pesannya.

Saat ini, pengembangan sentra tenun masih difokuskan di Desa Sukamaju dan Desa Karya Bhakti, Kecamatan Kombeng. Kedua desa tersebut dinilai paling siap karena konsisten mengikuti rangkaian pelatihan yang diselenggarakan Dekranasda. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh kecamatan yang memiliki potensi pengrajin tenun dapat berkembang menjadi sentra kerajinan pada masa mendatang.

Ia optimistis pengembangan ATBM akan berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi sekaligus memperluas peluang usaha bagi para pengrajin. Menurutnya, tujuan utama Dekranasda bukan hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menggali potensi daerah yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Tujuan Dekranasda adalah mengembangkan karya daerah, melestarikan budaya, menggali potensi yang dimiliki Kutai Timur, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,”



Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil karya para pengrajin, Siti Robiah berencana mendorong penggunaan tenun Kutai Timur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur apabila produksinya telah mampu memenuhi kebutuhan. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan OPD agar kain tenun dapat dimanfaatkan sebagai salah satu identitas busana daerah, berdampingan dengan batik yang selama ini telah lebih dulu berkembang.

"Kita tidak boleh meninggalkan batik hanya karena sudah memiliki tenun. Batik dan tenun harus sama-sama dikembangkan agar menjadi ikon daerah sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Siti Robiah juga mengungkapkan rencana pengembangan tenun berbahan baku serat nanas. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Pertanian yang mendorong budidaya tanaman nanas hingga Dinas Perindustrian yang mengolah serat nanas menjadi bahan baku tekstil.

Menurutnya, pemanfaatan serat nanas sebagai bahan tenun tidak hanya menghasilkan produk yang lebih beragam dan bernilai tambah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui kolaborasi antara sektor pertanian dan industri kreatif.

Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan lintas sektor, Dekranasda Kutai Timur optimistis tenun ATBM akan berkembang menjadi produk unggulan yang memiliki ciri khas kuat, mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sekaligus menjadi identitas baru Kabupaten Kutai Timur

Ny. Ir. Hj. Siti Robiah Ardiansyah
Ketua Dekranasda Kab. Kutai Timur

Kerja Kita

Dari NTT ke Kutai Timur, Bergitta Temukan Harapan Baru Lewat Pelatihan Tenun ATBM



Penulis : Wahyu Yuli Artanto

SANGATTA – Pelatihan Tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang digagas Dekranasda Kabupaten Kutai Timur memberikan pengalaman baru bagi para pengrajin. Salah satunya dirasakan oleh Bergitta warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini menetap di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang.

Ia mengaku, perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengrajin memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan yang sebelumnya sulit diperoleh.

“Di kampung, kami tidak pernah mendapatkan cara belajar seperti ini. Karena ada pemerintah dan Dekranasda yang membentuk pelatihan, kami bisa mendapatkan ilmu baru sampai akhirnya bisa menghasilkan karya, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, dukungan tersebut kembali membangkitkan semangatnya untuk terus berkarya. Bahkan, keluarga turut memberikan apresiasi atas keterampilan baru yang diperolehnya.

“Suami saya sampai bilang, seumur hidup baru sekarang saya mau ikut kegiatan seperti ini. Walaupun sudah tua, ternyata masih bisa semangat lagi belajar,” ungkap perempuan berambut Panjang itu.

Menurutnya, teknik tenun ATBM yang dipelajari saat ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan tenun ikat tradisional yang biasa dikerjakan di daerah asalnya.

“Kalau sudah mahir, saya rasa tenun ATBM ini lebih praktis dibandingkan tenun ikat daerah kami di NTT yang prosesnya cukup sulit,” ujarnya.

Dalam proses pembelajaran, kelompoknya kini sudah mulai menghasilkan produk tenun. Beberapa hasil karya telah diproduksi dan memiliki nilai ekonomi.

“Untuk hasil tenun ikat ini sudah ada produksinya. Di dinas sudah ada sekitar setengah meter, sedangkan secara pribadi saya sudah menghasilkan sekitar empat meter. Untuk motif kelompok, kami sudah membuat lima lembar,” jelasnya.

Produk tersebut juga mulai diminati masyarakat. Bahkan, beberapa hasil tenun yang dibuat kelompoknya sudah berhasil terjual. Hal ini menjadi pemicu semangat untuk terus menekuni ketrampilan yang di wariskan oleh ibunya ini

“Sudah ada yang kami jual, sekitar tiga lembar. Sekarang masih ada masyarakat yang memesan, tetapi masih dalam proses pengerjaan,” katanya.

Terkait arahan Ketua Dekranasda Kutai Timur (Siti Robiah Ardiansyah) agar pengrajin tetap mempertahankan identitas daerah melalui motif Wakaroros, ia menyambut positif hal tersebut. Menurutnya, perpaduan motif lokal Kutai Timur dengan motif khas NTT justru dapat menjadi kekuatan tersendiri.

“Saya setuju dengan arahan Ibu Ketua, Di kelompok kami juga sudah ada arahan dari kepala desa, kalau bisa nanti motif Wakaroros dipadukan dengan motif khas NTT. Setelah tenunan kami selesai, kami ingin mencoba membuat perpaduan antara motif NTT dan Wakaroros,” ungkapnya.

Dengan adanya pelatihan dan dukungan fasilitas tersebut, para pengrajin berharap kemampuan mereka terus berkembang sehingga mampu menghasilkan produk tenun yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.

Perkuat Tata Kelola, DWP Kutim Bekali Pengurus dengan AD/ART dan E-Reporting

Penulis : Irhan

SANGATTA - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Evaluasi Pelaporan E-Reporting di Ruang Meranti Sekretariat Daerah, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (12/08/2026).

Ketua DWP Kutim, Lisnawarty menyampaikan, Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola administrasi dan menyelaraskan pemahaman seluruh jajaran DWP.

Lewat sosialisasi ini, DWP Kutim berupaya memastikan seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas yang diemban di organisasi istri Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut Selain itu, ia juga menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajang untuk menyatukan visi organisasi.

"Ini adalah momentum untuk menyatukan langkah dan menyamakan pemahaman kita. Sebuah organisasi menjadi kuat bukan hanya karena banyaknya agenda, melainkan karena orang-orang di dalamnya mengerti arah serta tujuan organisasi tersebut," ujar Lisnawarty.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi pengurus DWP itu membawa amanah besar yang mencakup pemahaman aturan, pembinaan anggota, pengelolaan tata administrasi serta menjaga nama baik lembaga secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut melampaui keikutsertaan dalam seremoni atau sekadar mengenakan atribut resmi organisasi.

Melalui kesempatan itu, dirinya mendorong seluruh pengurus DWP, untuk tidak membatasi diri pada kegiatan rutin belaka, melainkan lebih peka mendengarkan aspirasi serta merangkul kebutuhan para anggota di lapangan.

"Kekuatan utama kita terletak pada kebersamaan. Jadikan setiap program sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan, serta jadikan wadah ini tempat perempuan untuk terus belajar, berkarya, berdaya dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.



Kerja Kita

Pembangunan RS Muara Wahau Dimatangkan, Dinkes Kutim Targetkan Operasional 2029

Penulis : Irhan

SANGATTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Muara Wahau Tipe D di Kecamatan Muara Wahau. Rumah Sakit tersebut ditargetkan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada 2029 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, tahapan pembangunan RS Muara Wahau saat ini masih dalam proses persiapan. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan sejumlah dokumen dasar pembangunan dapat diselesaikan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

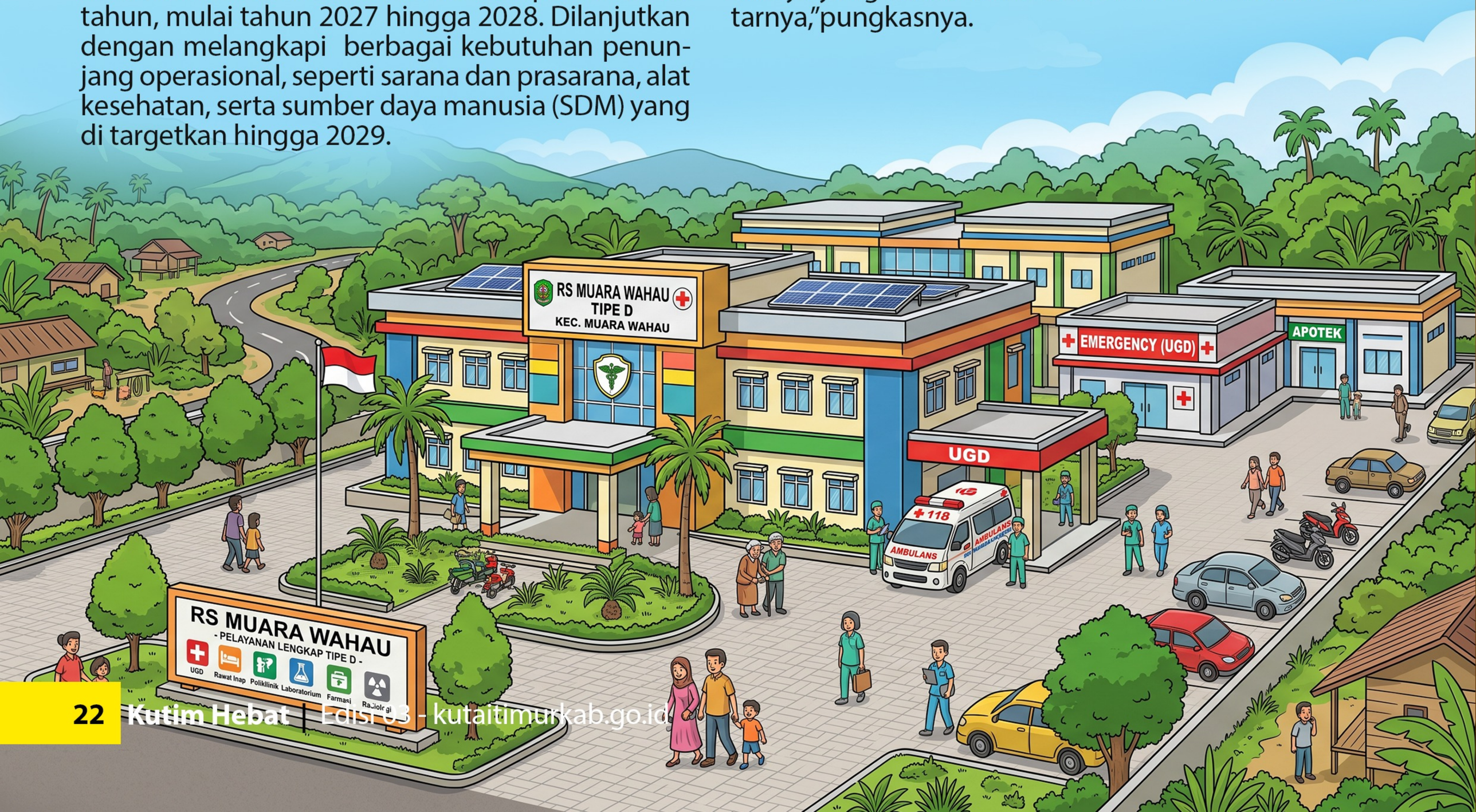
Setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan rampung, pembangunan fisik rumah sakit yang beralamat di Jalan Aneka, Desa Wanasari ini direncanakan di laksanakan secara bertahap selama dua tahun, mulai tahun 2027 hingga 2028. Dilanjutkan dengan melangkapi berbagai kebutuhan penunjang operasional, seperti sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta sumber daya manusia (SDM) yang di targetkan hingga 2029.

Namun, dirinya menyebut, target tersebut masih memungkinkan untuk dipercepat apabila seluruh proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan rumah sakit dapat diselesaikan lebih awal.

“Harapannya 2029 sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau bisa selesai sebelum itu, tentu lebih bagus,” ujar Yuwana usai ditemui awak media didepan Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Senin (10/08/2026).

Penetapan target tersebut, menurut perempuan berkacamata ini juga tetap mempertimbangkan kondisi fiskal, meski demikian, pembangunan rumah sakit yang telah lama dinantikan masyarakat diharapkan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan,

“Kami akan terus mengawal agar pembangunan RS Muara Wahau dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak langsung terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Muara Wahau dan sekitarnya,”pungkasnya.



Wabup Kutim Mahyunadi Dorong Penerapan Manajemen Talenta ASN di Forum APKASI

Sumber Pro Kutai Timur

DELI SERDANG – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menghadiri dialog Otonomi Daerah yang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, Wakil Bupati didampingi jajaran di lingkungan Pemkab Kutim ini, menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat sinergi antar daerah serta mendukung peran APKASI sebagai wadah strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Wabup Mahyunadi saat mengikuti Seminar garapan Apkasi 2026

Ditemui di sela kegiatan, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyambut baik kegiatan dan materi yang disampaikan selama seminar tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan ASN. Menurutnya, pengelolaan ASN berbasis kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan. Hal ini karena aparatur yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya akan mampu bekerja lebih optimal, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan yang di buka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh. Pria berkacamatan ini menilai, melalui forum APKASI, Pemerintah Daerah banyak memperoleh masukan dan informasi penting yang dapat implementasikan dalam pengelolaan sumber daya aparatur di daerah.

Selain itu, Pemerintah Kutim juga tengah bersiap untuk mempercepat implementasi sistem merit melalui penerapan manajemen talenta ASN. Langkah tersebut didukung dengan berbagai capaian strategis, di antaranya penghargaan penerapan sistem merit kategori baik pada tahun 2023, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk implementasi manajemen talenta, serta terbitnya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta ASN.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Melalui manajemen talenta, diharapkan setiap ASN dapat dipetakan potensi dan kompetensinya secara lebih terarah, sehingga penempatan jabatan dapat dilakukan secara tepat dan objektif.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan di daerah.

Menurut Zudan, manajemen talenta tidak hanya berfokus pada penempatan pegawai, tetapi juga memastikan setiap ASN memiliki kesempatan berkembang sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, birokrasi akan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.

"Manajemen talenta ASN menjadi salah satu percepatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di daerah," tegas Zudan di hadapan para kepala daerah dan peserta seminar.

Komitmen Bangun SDM Digital Berbuah Manis, **IMDI 2025 Lampaui Rata-Rata Nasional**

Penulis : Wiryadi



SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur kembali mencatatkan capaian positif dalam pembangunan masyarakat digital. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 yang diterbitkan Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi).

Kutai Timur memperoleh nilai 55,16, masuk dalam jajaran daerah dengan peringkat dengan kategori Tinggi (High) dan menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan nilai IMDI tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Timur, setelah Kota Bontang 56,84.

Sementara itu, untuk Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memperoleh nilai IMDI 47,17, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 44,53. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transformasi digital masyarakat di Kalimantan Timur berada di atas capaian nasional.

IMDI sendiri merupakan sebuah instrument yang di hadirkan oleh Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berfungsi untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.

Pengukuran yang dilakukan mencakup wilayah nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital secara merata. Ada 4 pilar utama yang di gunakan IMDI untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.

Yakni, Infrastruktur dan Ekosistem, meliputi ketersediaan sarana fisik dan penunjang digital. Literasi Digital yang mencakup tentang kemampuan mendasar masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi, kemudian, Pemberdayaan yang menyasar kepada pemanfaatan teknologi untuk produktivitas ekonomi dan sosial. Terakhir yang berkaitan dengan Pekerjaan. Dimana penilaian mengarah terhadap kesiapan tenaga kerja dalam menyerap keahlian di bidang digital.

Berikut rincian hasil penilaian IMDI Kutim meliputi empat pilar, P Infrastruktur dan Ekosistem 53,86. Literasi Digital 63,75. Pemberdayaan 52,12. serta Pekerjaan: 48,74. Dari keempat indikator tersebut, Literasi Digital menjadi pilar dengan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat Kutai Timur dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital semakin baik.

Dengan capaian tersebut, Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil membangun ekosistem digital melalui peningkatan literasi masyarakat, penyediaan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor.

Hasil IMDI 2025 menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan masyarakat menghadapi era digital. Capaian Kutai Timur diharapkan menjadi modal kuat untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, peningkatan kualitas infrastruktur digital, perluasan akses internet, penguatan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk produktivitas masyarakat menjadi langkah strategis agar nilai IMDI Kutai Timur terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Dengan raihan tersebut, menjadi bukti nyata komitmen yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang di laksanakan oleh dinas yang beralamat di jalan Prof dr Sudiatmo , kawsan Pemerintahan Bukit Pelangsi ini perlahan memberikan dampak nyatak kepada masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang secara tidak langsung mendukung setiap proses pembangunan daerah yang menjadi bagian dari visi misi Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi yang ingin mewujudkan Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing.



Berita Pilihan

Diskominfo Staper Kutim Siapkan **"Terpadu Digital Kutai Timur"**, Satu Platform untuk Semua Layanan Publik

Penulis : Wahyu Yuli Artanto

SANGATTA- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, menyebut capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 yang menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan nilai IMDI tertinggi kedua di Kalimantan Timur menjadi motivasi sekaligus pijakan untuk terus mempercepat transformasi digital di daerah.

“kami tidak ingin berhenti pada angka. capaian Ini menjadi hasil yang layak kita jadikan kekuatan baru di jajaran Diskominfo Staper, untuk lebih optimal lagi dalam mengawal berbagai program Kepala Daerah terutama yang berkaitan dengan tupoksi kita (Diskominfo Staper),”ujarnya.

Untuk terus mendukung realisai program kerja Diskominfo Staper, pihaknya juga terus melakukan trobosan dan inovasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas akses informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat.

Berbagai program terus dikembangkan, mulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis digital, pengembangan sistem pemerintahan Digital (PEMDI), hingga penguatan keamanan informasi melalui fungsi persandian. Selain itu, pemanfaatan data statistik sektoral juga terus dioptimalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.



Ronny Bonar H. Siburian, SE., M.A.P.
Kepala Dinas Kominfo Staper Kutai Timur

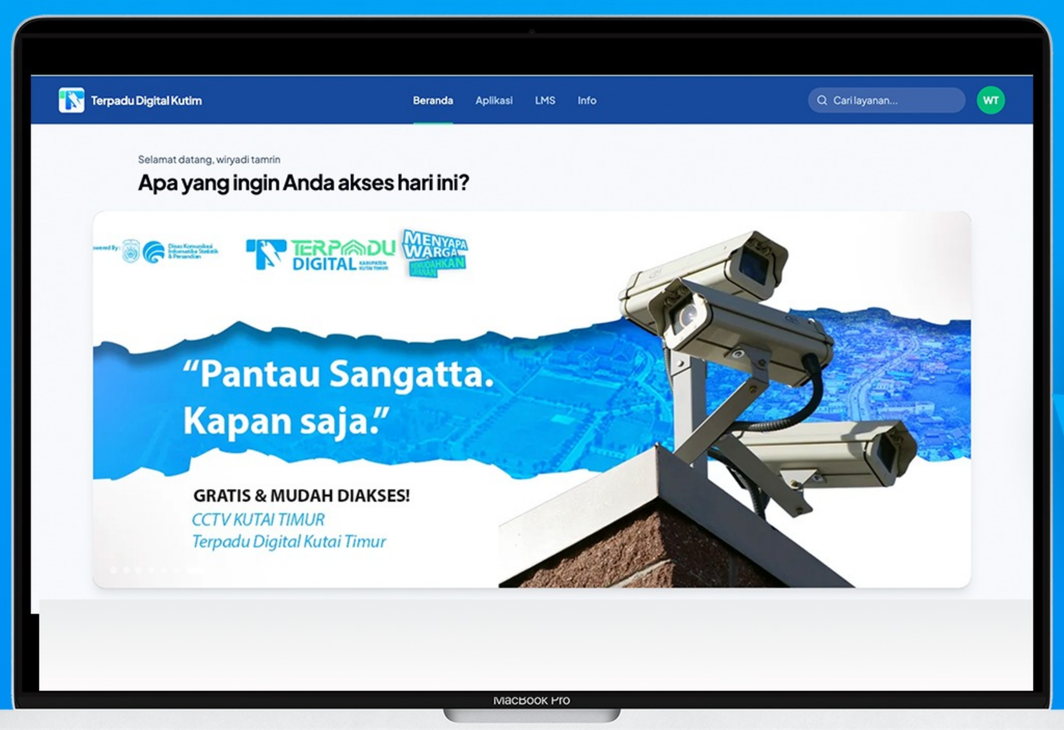
Program mengusung tagline “Menyapa Warga, Memudahkan Layanan” yang saat masih dalam tahap penyempurnaan ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan layanan publik, yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, data, informasi dari berbagai perangkat daerah dalam satu platform digital.

“Semua akan diarahkan dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.

Nantinya, pengembangan platform yang menjadi bagian dari proyek perubahan (Proper) yang sedang ia kerjakan, akan dibarengi dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, pemanfaatan Learning Management System (LMS) sebagai media peningkatan kompetensi ASN, serta penerapan tata kelola pemerintahan Digital (PEMDI) yang semakin matang.

Menurutnya, kolaborasi seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mampu menciptakan budaya kerja yang inovatif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Harapan kami, Terpadu Digital Kutai Timur menjadi fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan nilai IMDI Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Ronny.





Terpadu Digital Kutim Dorong Integrasi Layanan Publik

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui Terpadu Digital Kutai Timur, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah agar lebih mudah diakses masyarakat.

Program ini hadir untuk menjawab tantangan layanan digital yang masih tersebar di berbagai aplikasi dan perangkat daerah. Melalui satu platform, masyarakat nantinya dapat menemukan berbagai layanan sekaligus memperoleh panduan penggunaannya.

Terpadu Digital Kutim memiliki dua pilar utama, yakni repository pengetahuan sebagai pusat informasi dan panduan layanan, serta platform akademi atau Learning Management System (LMS) untuk meningkatkan literasi dan kompetensi digital masyarakat maupun aparatur.

Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur sekaligus peserta PKN Tingkat II Angkatan 10 Tahun 2026 Pusjar LKPP LAN RI Samarinda, Ronny Bonar H. Siburian, mengatakan transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi memastikan layanan mudah ditemukan, dipahami, dan digunakan masyarakat.“Tujuannya membangun ekosistem digital yang menyapa warga dan memudahkan layanan. Bukan sekadar menambah aplikasi, tetapi membuat pelayanan lebih mudah diakses,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan program membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, termasuk penguatan data, kompetensi aparatur, dan budaya kerja digital.

Dengan tagline “Menyapa Warga, Memudahkan Layanan”, Terpadu Digital Kutim diharapkan menjadi langkah strategis menuju pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tangga Bidadari, Pesona Mata Air Alami di Kaliorang yang Menyimpan Jejak Laut Purba

Penulis :Maulana & Wahyu Yuli Artanto

KALIORANG - Di tengah rimbunnya pepohonan dan hutan tropis Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan pesona bentang alam perbukitan yang sangat indah. Perpaduan struktur batu kapur dengan rimbunya pepohonan yang menjulang tinggi menjadi lanskap alami yang menyejukkan mata. Ditambah suara gemericik air yang mengalir dari sela-sela perbukitan, suasana di tempat ini terasa begitu tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan.

Mata Air Tangga Bidadari nama tempat yang saat ini menjadi destinasi wisata favorit masyarakat tidak hanya warga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun juga sudah di kenal luas hingga luar daerah.

Di balik keindahannya, Tangga Bidadari menyimpan cerita geologi yang menarik. Kawasan ini tersusun atas perselingan batugamping klastik jenis wackestone dan napal yang termasuk dalam Formasi Maluwi dan terbentuk pada periode Miosen Tengah, sekitar 11–16 juta tahun lalu.

Lapisan napal yang terlihat di kawasan tersebut berwarna putih kecokelatan, berbutir sangat halus dan bersifat karbonatan. Batuan ini juga mengandung fosil mikroorganisme yang menjadi petunjuk mengenai lingkungan laut purba pada masa pembentukannya.

Berada di Jalan Mata Air RT 01, Desa Selangkau, Tangga Bidadari menyuguhkan aliran mata air alami yang jernih dengan warna kebiruan. Air mengalir melewati susunan bebatuan bertingkat hingga membentuk kolam-kolam kecil menyerupai anak tangga. Bentuk alami inilah yang kemudian melahirkan nama Tangga Bidadari.



Situasi Masyrakat Mengunjungi Wisata

Suasana asri menjadi daya tarik utama kawasan ini. Pepohonan hijau yang mengelilingi mata air membuat udara terasa sejuk dan memberikan pengalaman tersendiri dalam menikmati Kawasan wisata di Kecamatan Kaliorang ini, kehadiran berbagai fasilitas pendukung juga menjadi salah satu alasan banyak wisatawan untuk betah berlama-lama.

Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp 10 ribu untuk bisa menikmati keindahan wisata Tangga Bidadari. Selain adanya toilet, gazebo, stand UMKM, pengelola juga menghadirkan cabin haouse (penginapan) yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan menikmati suasana lebih lama. Selain itu, pengelola juga menghadirkan stand khusus untuk memajang berbagai hasil kreatifitas, mulai dari baju, produk makanan, hingga kerajinan yang bisa dijadikan buah tangan oleh pengunjung.

Sebagai daya dukungnya, Kawasan itu di kelola oleh masyarakat lokal yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Pesisir, yang terdiri dari 10 warga asli Desa Selangkau.

Meskipun baru setahun terbentuk, Pokdarwis yang di nahkodai olah Yumahradian Sholeh ini mampu menyulap kawasan yang sebelumnya kurang menarik, menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

“Rata-rata kunjungan 70 orang keatas kalau hari biasa, akhir pekan bisa tembus 200 pengunjung. kalau puncaknya biasanya saat liburan sekolah atau hari besar bisa tembus sampai 4000 ribu orang,”ujar Sholeh sapaan akrab Yumahradian Sholeh.

Sholeh menyebut, pengembangan wilayah secara bertahap dan pentaan wilayah yang juga menjadi salah satu fokus utama pengelola akan terus di lakukan,agar lebih menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Target kami tidak hanya wisatawan lokal, namun juga mancanegara, ini menjadi salah satu motivasi kami untuk terus berbenah dan melengkapi berbagai fisilitas,”ujarnya.

Semangat tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya, potensi wisata alam yang dimiliki kawasan ini dinilai cukup besar untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi unggulan di Kutai Timur. Keindahan bentang alam, suasana hutan yang masih alami, serta keberadaan mata air menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Karena itu, pembenahan kawasan tidak hanya diarahkan pada penambahan fasilitas, tetapi juga pada penataan lingkungan agar tetap nyaman sekaligus menjaga keasrian alam. Pengelola menyadari, meningkatnya kunjungan wisatawan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan.

“Apalagi kita (Tangga Bidadari) juga masuk dalam penilaian Geopark Sangkulirang Mangkalihat, kami optimis apa yang kita harapkan bisa terwujud,”ucap Sholeh.

Keberadaan Tangga Bidadari juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keragaman destinasi wisata Kutim. Kekayaan alam yang dimiliki daerah ini tidak hanya menawarkan pantai dan laut, tetapi juga hutan, perbukitan, sungai, air terjun, hingga bentang geologi yang memiliki karakter unik.

Dengan potensi alam yang dimiliki serta pembenahan yang terus dilakukan, Tangga Bidadari perlahan menapaki jalan untuk menjadi salah satu tujuan wisata alam yang patut diperhitungkan di Kutai Timur. Bukan hanya menawarkan keindahan, tetapi juga membuka harapan baru bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.



Cabin House / Penginapan





Dari Sengat Jadi Berkah, Trigona Reborn Sulap Madu Kelulut Jadi Wisata Edukasi

Penulis :Maulana & Wahyu Yuli Artanto

SANGATTA SELATAN — Kutai Timur tidak hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan batu bara dan minyak. Di balik kekayaan tersebut, daerah ini juga memiliki potensi besar dari sektor pertanian dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah pengembangan madu kelulut yang mulai dikelola secara serius oleh masyarakat.

Salah satu pionir pengembangan madu kelulut di Kabupaten Kutai Timur adalah Kelompok Tani Trigona Reborn yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan. Kelompok yang berdiri sejak 2018 ini hingga kini konsisten mengembangkan dan membudidayakan lebah kelulut sekaligus menjadikan madu sebagai salah satu produk yang memiliki nilai ekonomi.

Beranggotakan sekitar 19 orang, Trigona Reborn tidak hanya berfokus pada pengembangan usaha secara kelompok. Masing-masing anggota juga memiliki peternakan atau budidaya lebah kelulut secara mandiri. Hasilnya pun mulai menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari pemasaran.

Pada kondisi puncak musim bunga, produksi madu dari kawasan tersebut dapat mencapai sekitar 50 liter dalam sebulan. Namun, ketika kondisi bunga dan cuaca kurang mendukung, produksi dapat turun hingga sekitar 20 liter per bulan.



Fluktuasi produksi tersebut membuat ketersediaan madu kelulut di pasar lokal masih belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan. Madu yang berhasil dipanen pun umumnya tidak membutuhkan waktu lama untuk terserap pasar.

Produk madu kelulut yang dihasilkan kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar, dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi sekaligus pemasaran produk.

Namun, bagi Trigona Reborn, menjual madu tidak sekadar berbicara mengenai merek, kemasan, maupun rasa. Edukasi kepada konsumen justru menjadi bagian penting dalam mengembangkan pasar madu kelulut.

Pengelola memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa karakter madu kelulut dapat berbeda-beda, baik dari sisi rasa maupun warna. Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi jenis tanaman yang menjadi sumber pakan lebah.

Karena itu, rasa asam, manis, maupun perbedaan warna madu tidak serta-merta menunjukkan bahwa suatu produk memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih tinggi. Karakter tersebut justru menjadi bagian dari keunikan madu yang dihasilkan dari lingkungan dan sumber pakan yang berbeda.

Pendekatan edukasi tersebut dinilai penting agar konsumen tidak hanya memilih produk berdasarkan rasa, tetapi juga memahami karakteristik madu kelulut yang dibelinya. Dengan demikian, pengetahuan konsumen diharapkan tumbuh seiring dengan meningkatnya minat terhadap produk madu lokal.

Tak berhenti pada madu cair, Trigona Reborn juga mulai mengembangkan sejumlah produk turunan berbahan madu kelulut. Di antaranya keripik, cookies, dan permen yang menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan produk sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil budidaya.

Potensi lain yang tengah dilirik adalah pengembangan propolis. Produk tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi, namun hingga kini belum dapat diolah secara maksimal menjadi produk siap jual.

Dari sisi legalitas, pengelola Trigona Reborn, Fuad, menyebut produk yang dihasilkan anggota kelompok telah dilengkapi berbagai perizinan yang dibutuhkan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan terkait produk UMKM.

Meski demikian, pengembangan usaha masih membutuhkan dukungan, terutama untuk pengujian laboratorium dan pengembangan produk. Langkah tersebut diperlukan agar produk turunan madu kelulut dapat terus dikembangkan dengan standar yang semakin baik dan memiliki daya saing lebih luas.

Tidak berhenti pada produksi dan pemasaran, Trigona Reborn juga mengembangkan konsep wisata edukasi yang memadukan budidaya madu kelulut dengan potensi lingkungan sekitar.

Salah satu lokasinya berada di kawasan perkebunan karet yang memiliki luas kurang lebih tiga hektare. Kawasan tersebut kemudian ditata menjadi tempat wisata edukasi, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana alam sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai budidaya dan pengelolaan madu kelulut.

Pengunjung dapat melihat secara langsung proses pengembangan koloni lebah kelulut hingga produksi madu. Bahkan, pengalaman yang ditawarkan cukup menarik karena pengunjung diberikan kesempatan untuk mencicipi langsung madu dari sarangnya.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, kawasan wisata tersebut juga dilengkapi sejumlah fasilitas, mulai dari gazebo, playground, hingga mini cafe. Perpaduan fasilitas tersebut membuat lokasi tidak hanya menjadi tempat belajar mengenai madu kelulut, tetapi juga menjadi ruang rekreasi keluarga dengan suasana yang rimbun dan sejuk.

Masyarakat yang ingin berkunjung disarankan melakukan reservasi terlebih dahulu melalui media sosial Instagram @kebunkelulut.sgt, terutama untuk mendapatkan informasi terkait kunjungan dan kegiatan edukasi yang tersedia.

Selain menerima kunjungan wisata, Trigona Reborn juga aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin mempelajari budidaya lebah kelulut. Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari Kutai Timur, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk belajar secara langsung mengenai pengembangan dan pengelolaan madu kelulut.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadikan kawasan Trigona Reborn sebagai salah satu tempat berbagi pengetahuan mengenai budidaya kelulut. Pengalaman yang telah dibangun sejak 2018 menjadi modal bagi kelompok untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memperluas manfaat usaha kepada masyarakat.

Sekretaris Trigona Reborn, Fuad mengatakan dalam proses pengembangan usaha tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. dirinya menilai pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan terhadap pengembangan kelompok, baik berupa fasilitas, pelatihan maupun pendampingan. Sejumlah bangunan yang berada di kawasan wisata juga dibangun melalui dukungan pemerintah termasuk peran dunia usaha yakni perusahaan yang ada di sekitar.

Salah satu perusahaan yang pernah menjadi mitra kelompok adalah Pertamina. Dukungan tersebut turut membantu pengembangan kawasan sehingga dapat menunjang aktivitas edukasi, budidaya, maupun kunjungan masyarakat.

Saat ini, madu kelulut juga mulai melekat sebagai salah satu ikon potensi lokal, khususnya di Kecamatan Sangatta Selatan. Keberadaan Trigona Reborn menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat mampu mengembangkan potensi pertanian dan lingkungan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus destinasi wisata edukasi.

“Kami juga sudah mulai merambah untuk pengembangan ikon lebah kelulut ini di jadikan motif batik, dan Alhamdullilah juga mendapat respon baik dari masyarakat,”ucap Fuad

Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa potensi Kutai Timur tidak semata-mata bertumpu pada sektor pertambangan. Produk berbasis pertanian dan sumber daya lokal seperti madu kelulut juga memiliki peluang untuk tumbuh menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah.

Dengan konsistensi budidaya, inovasi produk, edukasi konsumen, perluasan pemasaran, pengembangan wisata edukasi, serta pelatihan kepada masyarakat, madu kelulut memiliki peluang semakin besar untuk dikenal sebagai salah satu produk unggulan Kutai Timur, khususnya dari Kecamatan Sangatta Selatan.

Akademisi Unmul: **Dana Rp250 Juta per RT Bukan Sekadar Serapan Anggaran, Harus Diukur dari Dampak**



Sangatta - Program alokasi dana Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT) setiap tahun di Kabupaten Kutai Timur dinilai memiliki potensi besar menjadi terobosan pembangunan berbasis masyarakat. Namun, program tersebut harus dilaksanakan secara efektif, terukur dan terarah agar tidak berhenti pada penyerapan anggaran.

Pandangan itu disampaikan Saipul B, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman (Unmul), yang menilai dana RT secara konseptual harus ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Artinya, anggaran bukan sekadar untuk membiayai pembangunan, tetapi juga membangun kemampuan, partisipasi dan kemandirian warga.

Menurut Saipul, sedikitnya ada tiga prinsip yang perlu dijaga, yakni kesetaraan, partisipasi dan kemandirian. Seluruh warga harus memiliki ruang yang sama dalam menentukan kebutuhan pembangunan melalui musyawarah. Masyarakat juga perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dana Rp250 juta, lanjutnya, sebaiknya diposisikan sebagai stimulan atau suplemen, bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan di lingkungannya.

Anggaran Turun, Masyarakat Menentukan

Saipul melihat dana RT memiliki karakter berbeda dengan pola Musrenbang berjenjang. Selama ini aspirasi dari tingkat RT dibawa ke desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, sehingga tidak seluruh kebutuhan masyarakat selalu menjadi prioritas.

Melalui dana RT, pemerintah memberikan alokasi anggaran terlebih dahulu, kemudian masyarakat menentukan kebutuhan dan solusi berdasarkan persoalan di lingkungannya. Pola tersebut dinilai dapat memperpendek proses sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berinovasi.

Meski demikian, pemangkasan hierarki bukan berarti menghilangkan peran kecamatan, desa atau kelurahan. Struktur tersebut tetap dibutuhkan untuk koordinasi, pendampingan dan pengawasan.

Ada Koridor, tetapi Tidak Membatasi Inovasi

Agar pelaksanaannya terarah, penggunaan dana harus memiliki klaster yang jelas. Di antaranya infrastruktur skala kecil, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, lingkungan, kesehatan, pendidikan serta kebutuhan sosial lainnya sesuai ketentuan.

Untuk infrastruktur, perlu ditegaskan batas skala pekerjaan yang dapat dibiayai melalui dana RT. Infrastruktur berskala besar tetap menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.

Saipul membuka kemungkinan adanya pembagian atau persentase alokasi berdasarkan klaster sebagai panduan. Namun, pembagian tersebut tidak berarti seluruh RT harus menjalankan kegiatan yang sama. Setiap lingkungan memiliki persoalan dan prioritas berbeda. Karena itu, masyarakat tetap harus diberi ruang untuk berkreasi dan menentukan solusi yang paling sesuai.

Keberhasilan Bukan dari Serapan Anggaran

Pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah, OPD, kecamatan, desa atau kelurahan, hingga tingkat RT. Namun, pengawasan masyarakat juga harus diperkuat. Warga perlu mengetahui berapa anggaran yang tersedia, untuk apa digunakan, bagaimana pelaksanaannya dan apa hasilnya. Karena itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya pemahaman yang sama antara aparat pelaksana dan masyarakat mengenai tujuan serta mekanisme program.

Saipul menekankan, keberhasilan program tidak dapat hanya dilihat dari serapan anggaran. Setidaknya ada empat aspek yang harus diperhatikan, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Transparansi memastikan penggunaan anggaran diketahui masyarakat, akuntabilitas memastikan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, efektivitas melihat tercapai atau tidaknya tujuan, sedangkan efisiensi mengukur seberapa optimal manfaat yang dihasilkan dari anggaran.

Karena itu, serapan 100 persen bukan otomatis berarti program berhasil. Pemerintah harus mampu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah anggaran digunakan.

Output dan Outcome Harus Terukur

Ukuran keberhasilan harus diterjemahkan ke dalam output dan outcome yang jelas.Untuk kegiatan fisik, misalnya perbaikan jalan lingkungan, semenisasi gang, parit atau penerangan jalan, output dapat terlihat dari hasil pekerjaan. Namun, pemerintah juga harus mengukur manfaatnya. Jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih baik, lingkungan yang gelap menjadi lebih aman, atau parit yang bermasalah kembali berfungsi.

Hal serupa berlaku untuk program nonfisik. Dukungan kepada UMKM, misalnya, tidak harus selalu berupa modal, tetapi dapat berupa fasilitas pendukung usaha sesuai ketentuan. Untuk penanganan kemiskinan, intervensi dapat diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dalam skala yang diperbolehkan.

Program kesehatan dan stunting juga harus memiliki indikator yang terukur. Intervensi dapat diarahkan sejak masa kehamilan hingga bayi dan balita, kemudian dampaknya diukur melalui indikator kesehatan yang relevan, termasuk perkembangan kasus stunting dan tumbuh kembang anak.

.Selain manfaat fisik dan ekonomi, Saipul mengingatkan agar semangat gotong royong tidak hilang. Ketika masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, manfaat program tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga dapat memperkuat kebersamaan, kekeluargaan dan solidaritas warga. Nilai tersebut merupakan outcome sosial yang tidak selalu terlihat dalam laporan keuangan.

Evaluasi, Penghargaan dan Sanksi

Program dana RT harus dievaluasi secara serius setiap tahun. Dalam satu hingga dua tahun, pemerintah semestinya mulai dapat melihat perubahan pada bidang yang menjadi sasaran program, sedangkan memasuki tahun ketiga dampaknya seharusnya semakin mudah diukur.

Evaluasi harus menggunakan kondisi awal atau baseline, target dan perubahan setelah program dilaksanakan. Hasil evaluasi juga perlu dibuka kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi.

Saipul juga mendorong adanya penghargaan bagi RT yang mampu mengelola dana dengan baik. Pemerintah dapat membuat kompetisi atau apresiasi tahunan agar RT tidak berlomba menghabiskan anggaran, tetapi berlomba menghasilkan manfaat terbaik.

Sebaliknya, penyalahgunaan anggaran harus mendapat sanksi tegas. Jika ditemukan kegiatan fiktif atau penggunaan yang tidak sesuai ketentuan, penanganan dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan audit. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, proses dapat dilanjutkan sesuai mekanisme penegakan hukum.

Bukan Luas Wilayah, tetapi Kualitas Pelaksanaan

Luas wilayah Kutai Timur, menurut Saipul, tidak semestinya menjadi alasan program tidak efektif. Keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh kualitas koordinasi, komunikasi, pemahaman sumber daya manusia serta sosialisasi kepada masyarakat.

Jika pelaksana memahami tujuan program secara utuh, koordinasi berjalan baik dan sosialisasi dilakukan secara sistematis, persoalan jarak geografis masih dapat diatasi.

Pada akhirnya, Saipul menilai dana Rp250 juta per RT harus dijaga agar tetap efektif, terukur dan terarah melalui pengawasan, evaluasi, transparansi, penghargaan bagi RT berprestasi serta sanksi terhadap penyalahgunaan.

Namun, seluruh mekanisme tersebut tidak boleh menghilangkan esensi utama program sebagai instrumen pemberdayaan. Keberhasilan dana RT bukan hanya ketika jalan diperbaiki, parit dibangun atau bantuan disalurkan, tetapi ketika masyarakat menjadi lebih berdaya, mandiri, aktif berpartisipasi, mampu berinovasi dan memiliki semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan lingkungannya.

Dengan demikian, ukuran akhirnya bukan sekadar berapa rupiah yang terserap, melainkan apa yang berubah setelah anggaran digunakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Saipul tercatat sebagai dosen Fisipol Unmul sejak 2003. Ia pernah menjabat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama dua periode, 2012–2017 dan 2017–2022, serta Ketua Pusat Studi Sosial Humaniora dan Kebijakan Publik Unmul periode 2023–2025. Pada 2025, ia juga menjadi tenaga ahli penyusunan Peraturan Bupati terkait RT terbaik di Kabupaten Kutai Kartanegara.



KENALI PEMILIHAN SAMPAH



MULAI DARI HAL KECIL UNTUK LINGKUNGAN YANG LEBIH BAIK

Memilah sampah adalah langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan dan masa depan kota.

Ayo biasakan pilah sampah setiap hari!

- Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Sampah bernilai ekonomi, bisa jadi peluang
- Mempermudah daur ulang dan menghemat sumber daya
- Mengurangi beban tempat pembuangan akhir

KENALI 4 JENIS SAMPAH DAN CARA MENGELOLANYA

Sampah Organik



Sisa aktivitas memosak, sisa makanan, kulit buah, daun dan sampah mudah terurai lainnya.

Dapat diolah menjadi pakan ternak, kompus & pupuk organik

Sampah Anorganik



Sampah yang tidak mudah terursi dan dapat didaur ulang. Seperti plastik, botol, kace, Kertas, kardus

Pengelolaan di bank sampah dapat menjadi prodok baru, kerajinan tangan

Sampah B3



Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Seperti, pembarain lontal, pembasmi serangga, batu beterai, bohlam.

Limbah dapat dibawa ke TPSB3

Sampah Residu



Sampah yang tidak bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali (Kemasan aaset, popok, pembalut, putung rokok)

Dapat dibawa ke RDF Plant, PLTSa

SAMPAH MENUMPUK KARENA TIDAK DIPILAH

Sampah yang tercampur antara organik, anorganik, dan limbah berbahaya menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan sulit didaur ulang.



Etam Bisa

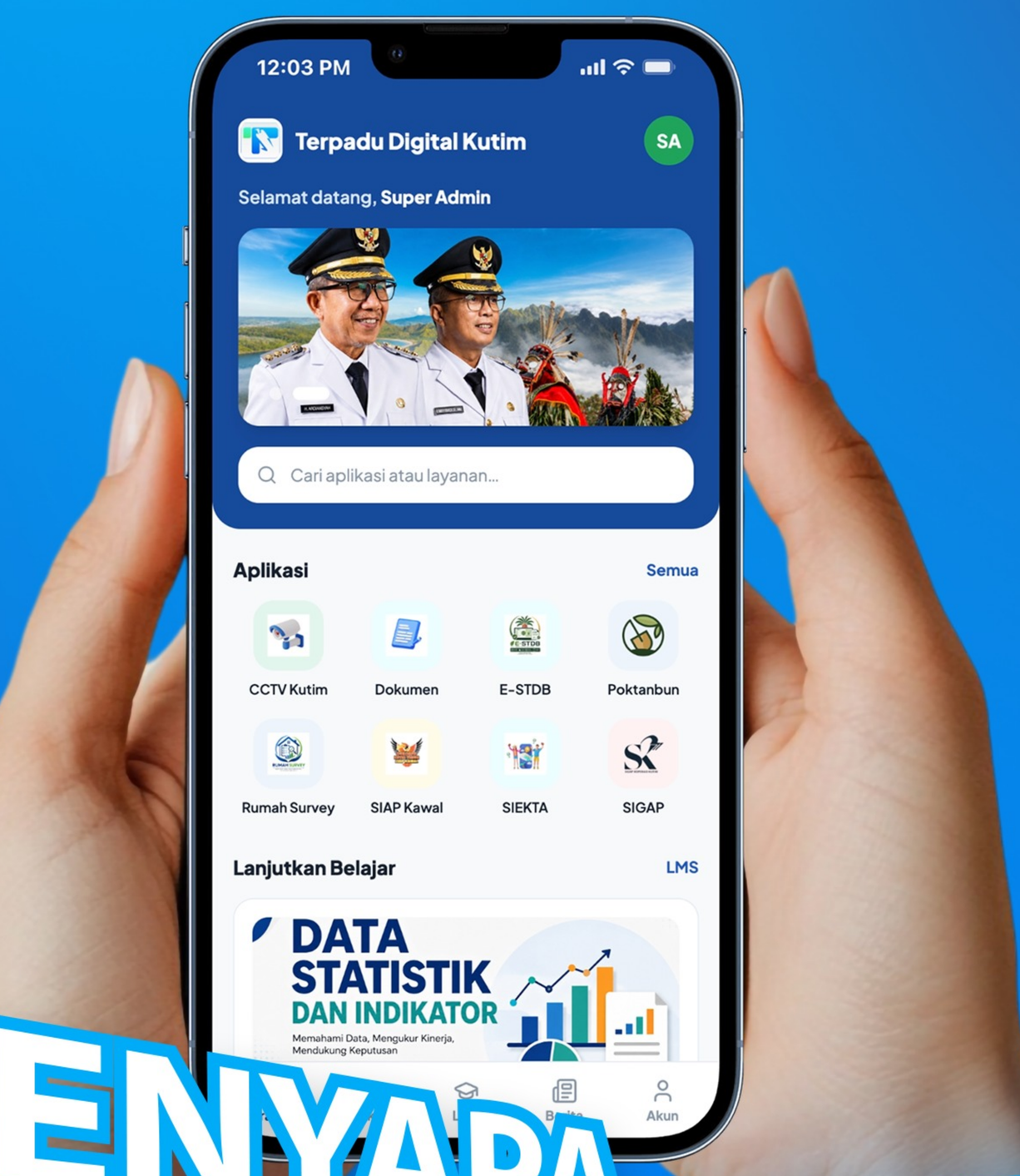
YUK PILAH SAMPAH DARI SEKARANG!

DUKUNG GERAKAN PEMILAHAN SAMPAH!

Wujudkan Lingkungan **Kutim Asri**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

TERPADU DIGITAL KABUPATEN KUTAI TIMUR



MENYAPA WARGA MEMUDAHKAN LAYANAN

Kunjungi Web

https:Terpadu.kutaitimurkab.go.id

GET IT ON Google Play

© DiskominfoStaper
Kutai Timur 2026

kutaitimurkab.go.id | Kominfo Kutim | @kominfo.kutim | Kominfo Kutim | @KominfoKutim | @kominfo kutim